

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Gerakan Serentak Membangun Kampung “GSMK”

Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan yang selanjutnya disebut GSMK (Juklak-Juknis GSMK, 2013) adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang agar berbuat kebaikan secara bersama dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur kampung/kelurahan diseluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Program ini tercantum dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat No.42 Tahun 2011 tentang pelaksanaan program GSMK, maka daerah kabupaten Tulang Bawang merancang suatu program pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan daerah yang dimana program tersebut dalam perencanaannya dari masyarakat, pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat, dan hasilnya untuk masyarakat itu sendiri. Program ini diberi nama “Gerakan Serempak Membangun Kampung” (GSMK).

Program ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam program kemandirian kampung dengan kapasitas yang dimilikinya baik secara individu dan kelompok dengan peningkatan produktivitas

secara nyata dalam peningkatan asset pembangunan. Sasaran lokasi kegiatan Program GSMK adalah di wilayah kampung/kelurahan se-Kabupaten Tulang Bawang sesuai Keputusan Bupati Tulang Bawang berdasarkan usulan Tingkat Kecamatan serta Rekomendasi Tim Pembina dan Koordinasi Kabupaten.

Tujuan dari pemberian Program GSMK ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat kampung/kelurahan dalam pembangunan daerah, melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Proses pembelajaran demokrasi dalam pembangunan.
3. Meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan.
4. Meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam melaksanakan proses pembangunan.
5. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di kampung/kelurahan.
6. Menimbulkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan yang dilakukan.

Ruang lingkup kegiatan yang dapat dilakukan melalui GSMK ini adalah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kampung yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti :

- a. Pembangunan jalan *Onderlagh*.
- b. Pembangunan jembatan.
- c. Pembangunan saluran Irigasi tersier.
- d. Dan/atau lainnya dengan persetujuan Bupati.

Program GSMK memiliki prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pelaksanaan program, prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam program GSMK adalah:

1. Prinsip inisiatif, bermakna bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan harus berasal dari usulan yang direncanakan oleh masyarakat Kampung/Kelurahan itu sendiri.
2. Prinsip partisipatif, bahwa dalam proses pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan mengedepankan partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif baik dalam bentuk pembiayaan, tenaga kerja, bahan material, maupun ide dan pemikiran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan.
3. Prinsip demokratis, bahwa dalam penentuan kegiatan yang akan direncanakan ditentukan dan diputuskan secara bersama baik di tingkat Kampung/Kelurahan maupun pada tingkat Kecamatan.
4. Prinsip manfaat, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.
5. Prinsip gotong-royong, bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan mampu mengedepankan rasa gotong royong dan kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat.
6. Prinsip berkelanjutan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat dipelihara, dan dilestarikan oleh masyarakat sendiri.

Adapun prinsip pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bantuan Program GSMK ini adalah:

- a. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat dengan menggunakan sumberdaya, tata cara dan teknologi tepat guna spesifik lokasi.

- b. Semua kegiatan dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, maupun administratif.
- c. Kegiatan yang dilakukan masyarakat Kampung/Kelurahan, merupakan kegiatan yang direncanakan dan dapat dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.
- d. Bentuk swadaya masyarakat dapat berupa bahan-bahan material (pasir, batu, semen), dana, tenaga kerja, dan lain lain.

Apabila terjadi sesuatu yang mengharuskan terjadinya perubahan jenis kegiatan yang telah ditetapkan, dibuat pernyataan dari masyarakat Kampung/Kelurahan melalui Tim Kecamatan dengan syarat tidak menambah alokasi Dana BLM Program GSMK yang sudah ditetapkan. Pelaksanaannya setelah mendapatkan persetujuan Konsultan Manajemen Pendamping dan Tim Pembina Kabupaten.

2. Kelompok

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kelompok merupakan kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat istiadat dan sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi antara manusia itu. Definisi kelompok menurut Berger, dalam Sutami (2011) kelompok adalah sejumlah individu berkomunikasi satu dengan yang lain dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga tiap orang dapat berkomunikasi dengan semua anggota secara langsung.

Menurut pendapat Sherif (1966), kelompok adalah kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif

dan teratur, sehingga di antara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur dan norma-norma tertentu. Kelompok tersebut merupakan wadah segenap individu-individu yang menyelenggarakan hubungan sosial. Pada setiap anggota kelompok selalu terdapat aksi-aksi serta reaksi-reaksi yang timbal balik.

Menurut Soekanto (1982), kelompok merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan, sedangkan kolektiva merupakan orang yang mempunyai rasa solidaritas karena berbagai nilai bersama dan yang telah memiliki rasa kewajiban moral untuk menjalankan harapan peran. kelompok memiliki ciri sebagai berikut:

1. Setiap anggota kelompok harus memiliki kesadaran bahwa ia adalah sebagian dari kelompok yang bersangkutan.
2. Adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya.
3. Ada suatu faktor yang dimiliki bersama, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat, seperti kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain.
4. Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku.
5. Bersistem dan berproses.

3. Masyarakat

Meskipun secara mudah bisa diartikan bahwa masyarakat itu berarti warga namun pada dasarnya konsep masyarakat itu sendiri sangatlah abstrak dan sulit ditangkap. Istilah masyarakat berasal dari kata musyarak yang berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa

Inggris disebut *society*, sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas.

Definisi masyarakat menurut Berger, dalam Sutami (2011), masyarakat adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya. Keseluruhan yang kompleks sendiri berarti bahwa keseluruhan itu terdiri atas bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan.

Menurut Soekanto (1982), ciri-ciri masyarakat pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang.
2. Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia-manusia baru. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antarmanusia.
3. Sadar bahwa mereka merupakan satu-kesatuan.

Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terikat satu dengan lainnya.

4. Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat adalah kumpulan dari individu yang saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga terjadinya timbal balik dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan dari kelompok masyarakat itu sendiri. Menurut keputusan Bupati Kabupaten Tulang Bawang tentang Pedoman Pelaksanaan Program

Gerakan Serempak Membangun Kampung/Kelurahan, terdapat peraturan Kelompok masyarakat yang merupakan tim pelaksana kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) di tingkat Kampung/kelurahan. Ditetapkan dengan surat keputusan camat atas usul kepala kampung/lurah, berdasarkan hasil musyawarah kampung/kelurahan.

Kelompok masyarakat (Pokmas) memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan
2. Menyusun proposal dan rencana teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan fasilitasi petugas teknis kecamatan, dan astek (konsultan manajemen pendamping
3. Menyiapkan dokumen administrasi sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang diberikan, menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan
4. Membuat atau membuka rekening Pokmas di bank yang ditunjuk dengan spesimen ketua pokmas dan bendahara pokmas,
5. Pencairan dana BLM dari rekening Pokmas, bendahara Pokmas harus mengajukan usulan untuk penggunaan dana kegiatan ke camat/PJOK setelah disetujui baru ke bank untuk dicairkan
6. Membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
7. Melakukan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana baik untuk upah tenaga kerja, pembelian bahan material, dan lainnya
8. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada camat secara periodik

Peranan ketua Pokmas adalah sebagai koordinator kegiatan di lapangan yang bersama masyarakatnya memutuskan jenis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Sekertaris mencatat hasil-hasil rapat, membuat laporan dan administrasi lainnya, sedangkan Bendahara membukukan penerimaan dan pengeluaran dana, serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada pemerintah dan penyandang dana lainnya.

5. Pengertian Peranan

Menurut Ndraha (1990), peranan (*role*) adalah aspek dinamis suatu lembaga. Peranan mewakili tata institusional (*institutional order*) suatu lembaga (dalam hal ini pemerintah). Semua peranan mewakili suatu lembaga secara menyeluruh, tetapi ada beberapa diantaranya yang secara simbolis dapat dianggap mewakili lembaga yang bersangkutan secara total.

Menurut Sajogyo dan Sayogyo (1992), peranan adalah seluruh pola kebudayaan yang berhubungan dengan posisi atau kedudukan tertentu yang mencakup nilai dan perilaku seseorang yang diharapkan oleh masyarakat pada kedudukan tertentu.

Kedudukan (*status*) adalah kumpulan hak-hak dan kewajiban tertentu yang dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi atau berinteraksi dengan orang lain.

Soekanto (1982), peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup 3 hal:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu-individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Barry (1995), peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Selanjutnya ia juga mengemukakan tentang konsep harapan-harapan (*role expectation*) yang terangkum dalam 2 macam harapan yaitu:

1. Harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban dari pemegang peran.
2. Harapan dari pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya.

Roucek dan Warren (1984), mengemukakan bahwa peranan adalah pola tingkah laku yang dilakoni individu pada saat berinteraksi berdasarkan pada pengalamannya terdahulu dan derajat persetujuannya terhadap apa yang dianggap sebagai jangkauan orang lain. Ciri yang ditunjukkan dengan nyata oleh individu dalam saling berintegrasi umum dalam situasi yang disebut peranan sosial.

6. Partisipasi Masyarakat

Sebagaimana diketahui, pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan, dan salah satu bentuk perubahan yang diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku. Partisipasi yang semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku tersebut. Dalam hal ini aktivitas lokal merupakan media dan sarana bagi masyarakat dalam melaksanakan partisipasinya.

Berbicara tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan, orang akan menemukan rumusan pengertian yang cukup bervariasi, sejalan dengan luasnya lingkup penggunaan konsep tersebut dalam wacana pembangunan. Mikkelsen (1999) misalnya menginventarisasi adanya enam tafsiran yang berbeda tentang partisipasi yaitu:

1. partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
2. partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek pembangunan;
3. partisipasi adalah proses yang aktif, yang mengadung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk menggunakan hal itu;
4. partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek, agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial

5. partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
6. partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Menurut Ndraha, diacu dalam Lugiarti (2004), partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dibagi menjadi:

1. partisipasi melalui kontak dengan pihak lain sebagai awal perubahan sosial
2. partisipasi dalam memperhatikan dan menyerap lalu memberi tanggapan terhadap informasi, baik menerima, menerima dengan syarat, maupun menolaknya
3. partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan
4. partisipasi pelaksanaan operasional
5. partisipasi menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat pelaksanaan pembangunan.

Menurut pendapat Mubyarto (1997), partisipasi merupakan kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri, sedangkan Canter (dalam Arimbi, 1993), mendefinisikan partisipasi sebagai *feed-forward information and feedback information*. Partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan

tersebut. Pendapat Canter juga tersirat bahwa masyarakat dapat memberikan respon positif dalam artian mendukung atau memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, namun dapat juga menolak kebijakan.

Ndraha (1990), keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual. Partisipasi yang dimaksud ialah partisipasi vertikal dan horisontal masyarakat. Partisipasi vertikal bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien. Disebut partisipasi horisontal, karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa, di mana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi horisontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Tentu saja partisipasi seperti itu merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian Sutami (2011) tentang Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Prasarana Lingkungan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara, disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda

Jakarta Utara, cukup besar. Besarnya tingkat partisipasi tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan masyarakat dan pemberian bentuk partisipasi yang semakin meningkat dalam setiap tahapan pembangunan prasarana lingkungan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan prasarana lingkungan menurut teori Arnstein (1998) yang disesuaikan dengan keberadaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) berada pada *tingkat therapy*. Pada tingkat ini masyarakat diikutsertakan dalam kegiatan tanpa diberi wewenang untuk menolak atau memberi saran, dan tanpa tahu keuntungan apa bagi mereka (non-participation). Namun jika dilihat dari keikutsertaan responden pada setiap tahapan pembangunan prasarana lingkungan menunjukkan bahwa responden sudah melakukan kerjasama yang baik dengan pemerintah sebagai penggagas adanya program PPMK. Indikasi adanya kerjasama ini, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah berada pada tingkat *kemitraan (partnership)*, dimana pada tingkat ini partisipasi masyarakat memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan. Kekuatan tawar menawar pada tingkat ini adalah alat dari elit kekuasaan dan mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Pemeran sepakat untuk membagi tanggung jawab perencanaan dan pengambilan keputusan melalui badan kerjasama, komite-komite perencanaan, dan mekanisme untuk memecahkan kebuntuan masalah.

Keaktifan masyarakat untuk mewujudkan bentuk partisipasi dalam perencanaan kegiatan pembangunan prasarana lingkungan cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan keaktifan dalam menghadiri dan mengajukan usul atau saran pada

pertemuan-pertemuan yang membahas perencanaan pembangunan prasarana lingkungan. Keaktifan masyarakat dalam peran perencanaan tidak terlepas dari keinginan masyarakat untuk mempunyai prasarana baru ataupun memperbaiki prasarana yang telah rusak di lingkungan mereka. Begitu pula pada tahap pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan dengan antusiasme keterlibatan masyarakat pada memberikan sumbangan dalam berbagai bentuk. Pada tahap pengawasan, keaktifan masyarakat untuk mewujudkan bentuk partisipasi juga tinggi, dikarenakan adanya tanggung jawab dari mereka sendiri untuk menyelaraskan antara perencanaan dan pelaksanaan sehingga sesuai dengan harapan masyarakat, serta banyaknya manfaat yang mereka peroleh.

Berdasarkan penelitian Andika (2013) mengenai Peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD) dan Partisipasi Masyarakat Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, disimpulkan bahwa tingkat peranan KPMDD dalam program PNPM-MP di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus sebagian besar termasuk dalam kategori tinggi, Terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan tingkat peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD) dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus

Berdasarkan hasil penelitian Murdiyanto (2011) mengenai Hubungan antara Peranan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan Desa Wisata Karanggeneng, Purwobinangun, Pakem,

Sleman, Tingkat peranan Pokmas dalam program pengembangan Desa Wisata Karanggeneng termasuk dalam kategori tinggi. Hal tersebut menunjukkan Pokmas sudah cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam program pengembangan Desa Wisata Karanggeneng namun belum dapat tercapai secara maksimal.

Partisipasi masyarakat dalam pemikiran, tentang kesadaran berbeda apabila masyarakat diminta untuk berpartisipasi dengan apabila tidak diminta. Terjadi kecenderungan penurunan partisipasi, dari partisipasi yang diminta menjadi partisipasi yang tanpa diminta. Hal ini berarti bahwa dalam pemikiran tentang kesadaran masyarakat masih rendah untuk berpartisipasi, namun penurunan tersebut masih dalam tingkat yang wajar. Tidak ada perubahan dalam tingkat partisipasi yang rendah, artinya masyarakat sudah memiliki kesiapan untuk berpartisipasi dalam pemikiran tentang kesadaran untuk mengembangkan desa wisata, hanya saja masyarakat masih harus diajak secara aktif oleh Pokmas untuk berpartisipasi dalam mengembangkan desa wisata, kesediaan menjadi pengurus desa wisata dan kesediaan hadir dalam pertemuan untuk membahas desa wisata.

C. Kerangka Pemikiran

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk miskin yang cukup besar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung pada tahun 2012 masih sangat tinggi yaitu sebanyak 1.253 juta jiwa atau 16,18% dari total penduduk Provinsi Lampung. Konsentrasi penduduk miskin Provinsi Lampung terbesar terdapat di wilayah pedesaan dibandingkan dengan wilayah

perkotaan. Salah satu penyebab banyaknya penduduk miskin dipedesaan adalah sulitnya akses ke pedesaan (Jayadinata, 1999).

Telah banyak program pembangunan yang digulirkan, salah satunya adalah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Sejak tahun 2013 Kabupaten Tulang Bawang telah menggulirkan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK). Program yang direncanakan akan dilaksanakan selama 5 tahun (2013-2017) ini ditujukan untuk mengembangkan infrastruktur prasarana di wilayah Kabupaten Tulang Bawang dengan berbasis partisipasi dan keswadayaan masyarakat.

Pelaksanaan program GSMK di tingkat kampung/kelurahan, dijalankan dan dikoordinasikan oleh Pokmas. Peran dan tugas Pokmas diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Program GSMK. Peran dan tugas Pokmas di antaranya adalah sebagai penghimpun potensi swaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang direncanakan bersama masyarakat.

Soekanto (1982) mendefinisikan peranan, merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup 3 hal yaitu peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan, peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan

oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu-individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Mengacu dari konsep peranan yang dikemukakan oleh Soekanto di atas, kelompok masyarakat merupakan organisasi dalam masyarakat yang penting dan memiliki struktur sosial. Kelompok masyarakat yang merupakan tim pelaksana kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) di tingkat Kampung/kelurahan. Ditetapkan dengan surat keputusan camat atas usul kepala kampung/lurah, berdasarkan hasil musyawarah kampung/kelurahan.

Kelompok masyarakat (Pokmas) memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Menyusun proposal dan rencana teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan fasilitasi petugas teknis kecamatan, dan astek (konsultan manajemen pendamping).
3. Menyiapkan dokumen administrasi sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang diberikan, menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan.
4. Membuat atau membuka rekening Pokmas di bank yang ditunjuk dengan spesimen ketua pokmas dan bendahara pokmas.
5. Pencairan dana BLM dari rekening Pokmas, bendahara Pokmas harus mengajukan usulan untuk penggunaan dana kegiatan ke camat/PJOK setelah disetujui baru ke bank untuk dicairkan.
6. Membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

7. Melakukan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana baik untuk upah tenaga kerja, pembelian bahan material, dan lainnya.
8. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada camat secara periodik

Selain dari peranan Pokmas, kunci keberhasilan Program GSMK adalah partisipasi masyarakat. Menurut pendapat Mubyarto (1977), partisipasi merupakan kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri, sedangkan menurut Ndraha, diacu dalam Lugiarti (2004), partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dibagi menjadi:

1. partisipasi melalui kontak dengan pihak lain sebagai awal perubahan sosial.
2. partisipasi dalam memperhatikan dan menyerap lalu memberi tanggapan terhadap informasi, baik menerima, menerima dengan syarat, maupun menolaknya.
3. partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
4. partisipasi pelaksanaan operasional.
5. partisipasi menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat pelaksanaan pembangunan.

Mewujudkan pembangunan alternatif, sudah saatnya melihat pentingnya masyarakat tidak lagi sebagai obyek tapi subyek pembangunan. Partisipasi masyarakat sepatutnya dianggap sebagai penentu keberhasilan pembangunan. Selama ini keterlibatan masyarakat hanya dilihat dalam konteks yang sempit, artinya masyarakat cukup dipandang sebagai tenaga kasar untuk mengurangi

biaya pembangunan sosial, sehingga peran serta masyarakat terbatas pada implementasi atau penerapan program. Masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah di ambil pihak luar.

Berdasarkan pengalaman di atas, maka perlu mengubah model pembangunan yaitu dengan menggunakan strategi pembangunan masyarakat dengan memprioritaskan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pada dasarnya rakyat itu memiliki suatu sumber daya yang apabila diberdayakan akan muncul karena digali berdasarkan kebutuhan masyarakat yaitu dari, oleh dan untuk mereka sendiri, sehingga apa yang menjadi tujuan akhir dari sebuah program dapat memberikan hasil yang optimal sesuai dengan harapan masyarakat.

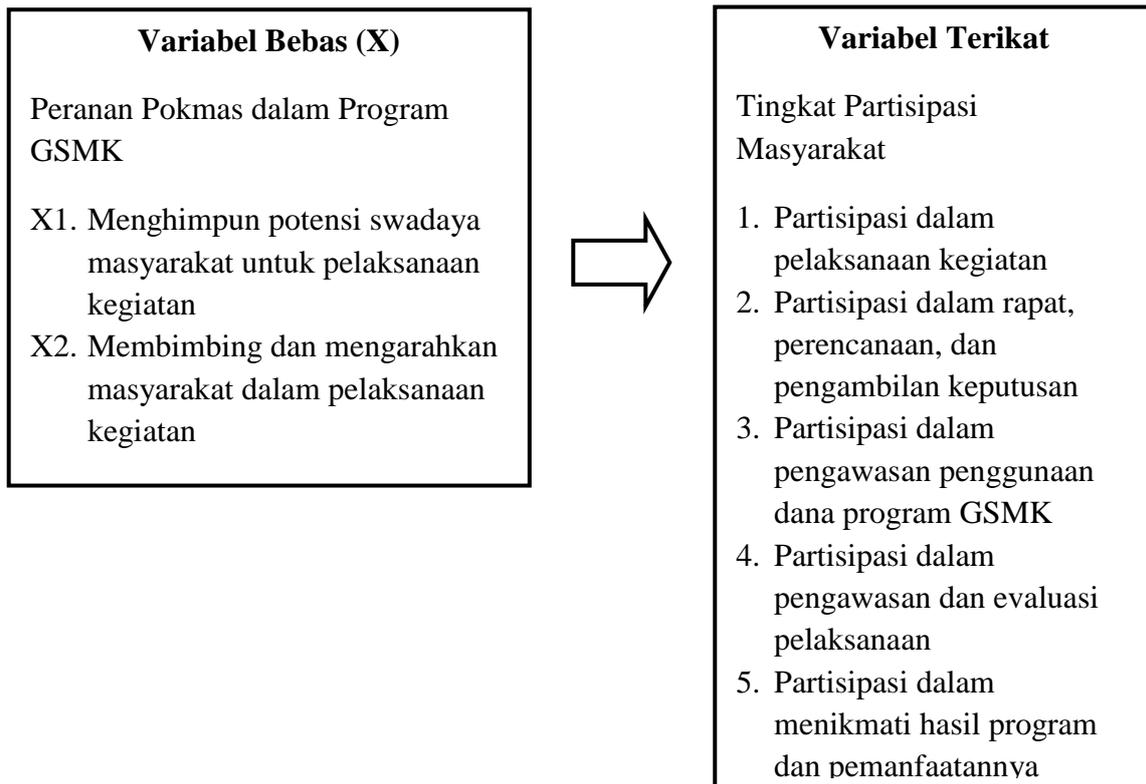
Salah satu kabupaten yang melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah Kabupaten Tulang Bawang, dengan program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK). GSMK bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa terutama masalah infrastruktur desa. Masyarakat juga akan belajar mengenai proses demokrasi dalam pembangunan serta meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan, meningkatkan semangat gotong-royong, mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di pekon atau kelurahan, dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan yang dilakukan.

Partisipasi masyarakat dalam program GSMK ditunjang oleh kelompok masyarakat (Pokmas) yang bertanggung jawab terhadap partisipasi masyarakat

dalam program GSMK. Sesuai dengan peran dan tugasnya Pokmas bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan program GSMK baik secara teknis maupun administratif di pekon/kelurahan.

Penelitian ini meneliti tingkat partisipasi masyarakat dalam Program GSMK. Partisipasi masyarakat dalam Program GSMK dihipunkan dan dibimbing oleh Pokmas. Terdapat Delapan peran pokmas yang dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Program GSMK, dari delapan peran tersebut terdapat dua peran Pokmas yang akan diteliti karena berhubungan langsung dengan tingkat partisipasi masyarakat. Dua peran pokmas yang berhubungan langsung dengan tingkat partisipasi masyarakat yaitu menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan (variabel X1) dan membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan (variabel X2).

Tingkat partisipasi masyarakat dalam penelitian ini adalah bentuk partisipasi yang dilaksanakan sesuai dengan arahan Pokmas. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program GSMK dijadikan sebagai variabel terikat (Y) dalam penelitian ini. Secara sistematis kerangka pemikiran hubungan antara partisipasi masyarakat dengan peranan Pokmas dalam program GSMK dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar1. Kerangka pemikiran hubungan antara peranan Pokmas dengan partisipasi masyarakat dalam Program GSMK

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian dan kerangka pemikiran di atas hipotesis yang diajukan adalah:

1. Diduga tingkat peranan Pokmas dalam menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan berhubungan nyata dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Program GSMK.
2. Diduga tingkat peranan Pokmas dalam membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan berhubungan nyata terhadap partisipasi masyarakat dalam Program GSMK.